

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN DARI SUDUT PANDANG PENDIDIKAN

Yusran

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Email: yusranasnawi@gmail.com

ABSTRAK

MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan suatu tinjauan terhadap masalah utama, konsep dan strategi serta alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan Perkembangan Pendidikan Vokasional dalam menghadapi penerapan kebijakan kawasan terintegrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Adapun ciri-ciri utama MEA adalah (1) kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, (2) memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata, (3) seluruh wilayah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global, dan (4) basis dan pasar produksi tunggal. Pemerintah dalam upaya penyiapan tenaga kerja terampil, telah merencanakan peningkatan jumlah peserta didik SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Beberapa langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, yaitu (1) kerja sama antar Kementerian/Lembaga, (2) penentuan kurikulum SMK sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, (3) prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal bangsa, (4) pendampingan usaha, (5) standarisasi produk dari hasil usaha siswa SMK, (6) insentif, subsidi atau pajak ringan untuk produk dalam negeri, dan (7) menciptakan inovasi sesuai dengan SDA yang dimiliki.

Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

PENDAHULUAN

 seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang teknologi informasi yang memungkinkan ketiadaan batas antar wilayah domestik dan bahkan internasional. Hal tersebut mengharuskan bangsa-bangsa di dunia harus menyesuaikan diri baik dalam pembangunan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan bahkan pembangunan bidang ekonomi. Artinya kedepan dengan perkembangan teknologi dan informasi, akan menjadikan hubungan apapun terbasuk ekonomi akan menuju ke era bebas.

Trend ekonomi dunia ke-era perdagangan dan investasi bebas, dimana perdagangan barang dan jasa antar negara tidak lagi mengalami hambatan-hambatan yang berarti dalam *quota* dan tarif. Bentuk perdagangan bebas di era global ini dampaknya adalah Indonesia harus mempersiapkan pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetensi dan standarisasinya mengikuti kualifikasi dunia. Penerapan teknologi baru dalam industri mengandung konsekuensi peningkatan permintaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas.

Hal itu ditanggapi oleh bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of South East Asia Nation, melalui beberapa kali diadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN. Pada Tahun 1997, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit di Kuala Lumpur, Malaysia. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Roadmap jangka panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang disepakati pada tahun 1998.

Kemudian melalui deklarasi Bali Concord II pada tahun 2003 di Bali. Komunitas ASEAN 2020 diimplementasikan melalui 3 pilar, yakni ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, dan Socio-Cultural Community. Namun, pada saat ASEAN Summit ke-12 pada 2007, dalam Cebu Declaration, ASEAN memutuskan untuk mempercepat pembentukan integrasi kawasan ASEAN menjadi 2015.

Perubahan tidak saja akan terjadi dalam struktur lapangan kerja, tetapi juga dalam sistem pendidikan. Untuk dapat mendekatkan program pendidikan yang relevan dan dibutuhkan masyarakat, pendidikan harus selalu menyesuaikan diri (*adjust*) dengan segala pembaharuan (*innovations*) yang diperlukan. Pelatihan tenaga kerja diperlukan pada periode tertentu untuk dapat mengaktualkan diri terhadap perkembangan teknologi. Konsep pendidikan sepanjang hayat (*long life education*) dianggap perlu bagi dunia kerja, pekerja harus melatih diri kembali dalam *in service training*, mengikuti pelatihan kursus formal dan non formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif mempunyai 2 ciri: 1) memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada waktu penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual; 2) menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional. Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menelaah seluruh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan

a. Tahun 2009 sd 2014

Kompas.com 22 Mei 2009, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, pemerintah melalui Depdiknas

sangat berkomitmen meningkatkan kualitas siswa SMK di seluruh Indonesia. Komitmen tersebut sangat diperlukan agar lulusan SMK bisa diserap diberbagai lapangan pekerjaan yang ada. Komitmen itu sekaligus juga untuk mengurangi angka pengangguran.

Bentuk komitmen tersebut juga dengan memperbanyak jumlah SMK di tanah air sejak tahun 2004 silam. Menurut Mendiknas, jika program ini konsisten, pada tahun 2014 rasio perbandingan jumlah SMK dengan SMA bisa mencapai 2 : 1, dengan kata lain, setiap terdapat satu SMA di salah satu wilayah maka di wilayah tersebut harus memiliki dua SMK. (22 Juli 2011, henisatyanto.wordpress.com).

Proporsi jumlah SMK 70%, SMA 30% dinegeri ini sepertinya cocok jika dikaitkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Konsekwensinya adalah dunia kerja yang akan menampung lulusan SMK harus siap meskipun untuk memasukinya lulusan SMK masih perlu dilatih.

Analisis atas potensi wilayah dan keperluan dunia kerja sangat menentukan atas keberadaan sebuah SMK. Sedangkan untuk SMA adalah pertimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan peningkatan rasio jumlah peserta didik SMK : SMA dari 30:70 menjadi 67:33 tertuang dalam rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005–2009 dan 2010–2014. Pemerintah telah merencanakan peningkatan jumlah peserta didik SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Perluasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai bentuk SMK, yaitu SMK Besar di kawasan Industri, SMK kelas jauh di Pesantren/institusi lain, SMK di daerah perbatasan, SMK kecil di daerah terpencil dan perdesaan, SMATerbuka dan Sekolah

Menengah Terpadu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah di sektor manufaktur, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pariwisata, ICT, pertanian, serta teknologi dan seni (konservatoribudaya), pemerintah akan meningkatkan jumlah peserta didik SMK, yang diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2009, pemerintah mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau di atas SNP setidaknya mencapai 50% SMA dan 50% SMK (Renstra Depdiknas, 2005-2009). Melalui analisis SWOT pada tahun 2009, Depdiknas memperbarui rencana strategisnya dengan menetapkan proporsi SMK:SMA sebesar 67:33 (RenstraDepdiknas, 2010-2014).

Penentuan jurusan atau program studi keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengacu kepada spectrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Menurut keputusan tersebut terdapat 6 Bidang Studi Keahlian, 33 Program Keahlian dan 121 Kompetensi Keahlian. (1) kelompok keahlian Teknologi dan Rekayasa memiliki 18 Program Studi Keahlian dan 66 Kompetensi Keahlian; (2) Kelompok keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki 3.

Program Studi Keahlian dan 9 Kompetensi Keahlian;(3) kelompok keahlian Kesehatan memiliki 2 Program Studi Keahlian dan 6 Kompetensi Keahlian, (4) kelompok keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata memiliki 7 Program Studi Keahlian dan 22 Kompetensi Keahlian;(5) kelompok keahlian Agribisnis dan Agroteknolgi memiliki 7 Program Studi Keahlian dan 14 Kompetensi Keahlian, dan (6) kelompok keahlian Bisnis Manajemen memiliki 3 Program Studi Keahlian dan 4 Kompetensi Keahlian.

b. Tahun 2014 sd Sekarang

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah ke depan akan memperbanyak serta memprioritaskan dan meningkatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) daripada Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuannya untuk dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Sebab saat ini banyak pengangguran berasal dari lulusan SMA yang tidak memiliki kecakapan dan keahlian.

Hamid menyebutkan, rasio SMK dan SMA yang ditargetkan adalah 60 : 40. Namun untuk pilihan melanjutkan pendidikan di SMK, pemerintah sepenuhnya kembali menyerahkan kepada orangtua .

Hamid menerangkan, tren membangun SMK lebih banyak dari SMA didorong oleh faktor ekonomi masyarakat pada umumnya. Hamid mencontohkan wilayah seperti Provinsi NTT, pemerintah menargetkan rasio SMK dan SMA 70 : 30. Hal ini dilatarbelakangi oleh minat kerja di NTT selepas lulus pendidikan menengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan animo melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sementara untuk wilayah Aceh, pemerintah lebih banyak membangun SMA, karena didukung oleh animo untuk melanjutkan pada perguruan tinggi sangat tinggi.

Hamid menjelaskan, proporsi pendirian dan peningkatan SMK yang sedang dicanangkan pemerintah disetiap daerah akan berbeda. Pemerintah akan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak semua wilayah menjalankan program rasio SMK lebih tinggi dari SMA. Semua kembali pada animo ekonomi masyarakat setempat.

2. Hubungan SMK dengan Ketenagakerjaan

Sejak semula, pendidikan teknik dan kejuruan di arahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional. Landasan pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan adalah:(1) menciptakan keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja untuk perluasan industri;(2)

memenuhi aspirasi pendidikan masyarakat; dan (3) memenuhi kemampuan yang diperlukan untuk pembangunan dalam pengertian yang luas yang meliputi keterampilan, kecerdasan dan sikap yang sehat untuk bekerja (Soenaryo, 2002).

Bank Dunia yang bekerjasama dengan Depatemen Tenaga Kerja telah melakukan survei ketenaga kerjaan dari tahun 1971–1981. Hasil survei kemudian digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan sepuluh tahun kemudian.

Piramida tenaga kerja menurut tingkat pendidikan di negara berkembang relatif konstan. Kebutuhan tenaga kerja terampil level menengah relatif lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja ahli dengan perbandingan 1:25 atau satu orang tenaga profesional lulusan universitas dengan 25 orang tenaga terampil lulusan SMK/SMA. Melalui analisis tersebut, pengembangan pendidikan kejuruan merupakan keputusan yang cukup strategis untuk dilaksanakan. Jumlah dan jenis keterampilan yang dibutuhkan tergantung pada pembangunan sektor ekonomi dan subsektor lainnya. Pengembangan tenaga kerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, bisnis dan jasa.

Proyeksi kebutuhan tenaga kerja masih sesuai dengan fakta struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2004, struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan SLTA masih relatif tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi. Angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SD dan tidak tamat SD) di perkotaan lebih kecil dibandingkan daerah pedesaan sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan menengah keatas sebaliknya yaitu di perkotaan lebih besar dari pada pedesaan.

Meskipun pengembangan SMK penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja namun pengembangan SMK seyogyanya memperhatikan prinsip-prinsip yang pernah dirumuskan oleh Charles Prosser

(Abdurrahman, 2008). Pendidikan kejuruan akan efisien dan efektif antara lain jika:

- a. Lingkungan tempat peserta didik berlatih merupakan replika dari lingkungan tempat mereka akan bekerja yaitu menggunakan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja.
- b. Memberi pengalaman berlatih yang berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar seperti yang diperlukan dalam pekerjaannya kelak.
- c. Memotivasi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan sampai pada tingkat yang paling tinggi.
- d. Guru menguasai kompetensi dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang diajarkan.
- e. Terdapat standar kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh setiap pekerjaan yang mengacu pada pengalaman para ahli pada pekerjaan tersebut.
- f. Memperhatikan permintaan pasar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- g. Tersedia biaya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan.

Berdasarkan prinsip-prinsip pendirian pendidikan kejuruan yang telah dipaparkan di atas, penambahan jumlah SMK bukan suatu kebijakan yang harus dilakukan oleh semua daerah. Kebijakan perimbangan proporsi SMK:SMA menjadi 67:33 harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan demikian, penerapan kebijakan di DIY dapat berbedadengan penerapan kebijakan di daerah lain. Peningkatan peserta didik SMK sangat diperlukan oleh daerah yang sedang membangun industri yang berlandaskan pada pengembangan ekonomi kreatif.

Pendidikan lebih bermakna apabila relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Hasil kajian Emidawati (2010) terhadap perkembangan pendidikan kejuruan di kota Medan diperoleh rekomendasi dari pakar-pakar

pendidikan di kota tersebut yaitu: “Rencana penambahan jumlah peserta didik SMK perlu dipertimbangkan kembali. Mutu SMK perlu ditingkatkan terlebih dahulu supaya daya tarik masyarakat terhadap pendidikan kejuruan meningkat. Menurut penilaian para pakar dan mitra industri, kompetensi lulusan pendidikan kejuruan belum sepenuhnya memenuhi standar industri. Lulusan SMK yang bekerja di industri masih harus di didik dan dilatih kembali sehingga memerlukan biaya tambahan. Beberapa pengusaha yang merekrut lulusan SMK dan SMU, menyatakan bahwa lulusan SMU jika dilatih juga akan memiliki keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan lulusan SMK. Selanjutnya disarankan agar dibangun kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai pihak swasta yang memerlukan tenaga kerja terampil. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengubah sistem pendidikan dari *output oriented* menjadi *job oriented* sehingga angkatan kerja yang baru sudah siap masuk ke pasar kerja.

Kebijakan peningkatan jumlah peserta didik SMK menjadi 67% pantas dikaji ulang. Berdasarkan hasil studi literatur, tidak semua komponen pendidikan siap melaksanakan. Kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap sambil menyiapkan infrastruktur yang diperlukan oleh SMK.

B. Langkah-Langkah Strategis

Berdasarkan pembahasan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka penerapan kebijakan MEA tahun 2015, dapat diajukan beberapa langkah-langkah strategis/alternatif pemecahan masalah yang harus dilakukan :

1. Harus ada kerja sama antar Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan pembangunan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
2. Harus ada pemetaan dahulu industri-industri yang nantinya menjadi pasar lulusan SMK
3. Identifikasi keahlian apa yang dibutuhkan untuk industri, yang nantinya menentukan kurikulum SMK.
4. Industri diwajibkan menyediakan tempat bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sampai tingkat suatu keahlian terpenuhi sebagai persyaratan izin investasi.
5. Industri diwajibkan menerima tenaga kerja lokal bangsa.
6. Adanya pendampingan usaha.
7. Diperlukan standar produk dari hasil usaha siswa SMK.
8. Diberikan insentif, subsidi atau pajak ringan untuk produk dalam negeri.
9. Mencari dan menciptakan inovasi sesuai dengan SDA yang dimiliki.

Untuk itu dalam rangka mengantisipasi tantangan bidang pendidikan khususnya dalam memperkuat lembaga pendidikan vokasional, secara umum ada empat usaha yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu :

1. Penguatan manajemen
2. Peningkatan Mutu
3. Perencanaan jangka panjang
4. Membangun networking/kerjasama dengan lembaga lain

KESIMPULAN

a. MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN.

b. Adapun ciri-ciri utama MEA adalah (1) kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, (2) memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata, (3) seluruh wilayah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global, dan (4) basis dan pasar produksi tunggal.

- c. Pemerintah telah merencanakan peningkatan jumlahpeserta didikSMKsecaraproporsionaltermasukupaya penataanbidangkeahliandanprogramstudidiS MKsertafasilitasmagang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- d. Secara umum ada empat usaha yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu : (1) penguatan manajemen, (2) peningkatan Mutu, (3) perencanaan jangka panjang, dan (3) membangun networking/kerjasama dengan lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2008). *Qua vadis sekolah menengah kejuruan di indonesia implikasinya terhadap kebijakan proporsi jumlah Siswa SMK : SMU = 70:30*. Makalah disampaikan pada konvensinasional AKPEKTINDO di UNP Padang tanggal 4-6 Juni 2008.
- Association of Southeast ASIAN Nations (2008). ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT. Jakarta: Asean Secretariat.
- Depdiknas. (2005). *Rencana strategis pendidikan nasional 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas
- _____. (2010). *Rencana strategis pendidikan nasional 2010-2014*. Jakarta: Depdiknas
- Emidawati.(2010). Perkembangan Pendidikan Kejuruan di Kota Medan. Makalah disampaikan pada seminar internasional APTEKINDO dengan tema peran LPTK dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Denpasar, 30April2010
- Fernandez, R. A. (2014, Januari). YEARENDER: Asean Economic Community to play major role in SEA food security.
- Plummer, M, G., &Yue, C, S. (2009). *Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- N.n. (2013). *Indonesia Hanya Menduduki Peringkat Empat di ASEAN*.
- Santoso, W. et.al (2008). *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional*. Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.